



Penarikan Dana Hibah-Bansos Dewan Soroti Kinerja Eksekutif

Gianyar (Bali Post) -

Di tengah sulitnya pencairan dana hibah dan bansos, eksekutif malah meminta sejumlah kelompok perajin agar mengembalikan dana hibah-bansos yang baru diserahkan sekitar sebulan lalu. Masyarakat penerima pun kebingungan melakukan pengembalian lantaran dana yang diberikan sudah digunakan.

Anggota DPRD Gianyar, Wayan Budiana, mengatakan, pihaknya mendapat laporan bahwa kelompok perajin Amerta Sari di Banjar Basang Ambu Desa Manukaya Kecamatan Tegallalang didatangi sejumlah petugas Disperindag Gianyar sekitar seminggu lalu. Saat itu, petugas menagih kembali dana hibah-bansos sebesar Rp 10 juta yang baru diserahkan sebulan lalu.

Tidak hanya kelompok perajin di Banjar Basang Ambu, belasan kelompok perajin lainnya juga menyampaikan hal serupa. Dari kejadian ini, ia pun mempertanyakan proses verifikasi yang dilakukan eksekutif lantaran sebelumnya kelompok-kelompok perajin tersebut dinyatakan lolos mendapatkan bantuan.

"Saya akan koordinasi lagi dengan Disperindag. Sekarang, warga saya kebingungan bagaimana harus mengembalikan, karena dana tersebut sudah dibelanjakan menjadi barang," keluhnya.

Budiana menuding eksekutif berupaya menyembunyikan kesalahan ini sebab petugas yang mendatangi kelompok perajin di Banjar Basang Ambu meminta agar warga tidak menceritakan hal ini kepada anggota dewan Gianyar atau media. "Ini kan lucu ya. Satu sisi warga saya diminta mengembalikan dana hibah-bansos, di sisi lain warga saya ditekan agar tidak mengadu ke dewan," tandasnya.

Sementara itu, Wakil Bupati Gianyar Made Mahayastra tidak menampik adanya sejumlah penarikan dana hibah-bansos dari sejumlah kelompok. Alasannya, kelompok masyarakat dimaksud belum berbadan hukum.

"Ditarik itu yang tidak sesuai dengan PP dan yang terutang dalam Perbup. Misal pura dadia tidak bisa. Kalau kelompok harus berbadan hukum. Kalau tidak berbadan hukum ya ditarik karena tidak berada di bawah naungan desa pakraman," jelasnya.

Dikatakannya, kunci dari persoalan ini adalah proses verifikasi sehingga itu menjadi tanggung jawab SKPD terkait. Ia membeberkan, di Disdikpora ada sekitar dua penarikan kembali dana hibah-bansos. Sementara untuk penarikan yang dilakukan oleh petugas Disperindag yang dikeluhkan anggota dewan, Mahayastra mengaku akan mengeceknya.

"Nanti itu tergantung SKPD yang berani mencairkan karena verifikasi dari SKPD. Kuncinya di proses verifikasi sehingga pertanggungjawabannya ada di SKPD sebagai pengelola," tandasnya. (kmb35)

Edisi : Rabu, 14 Des 2016

Hal : 9



Kasus Korupsi Bantuan Kapal Ikan Dua Calon Tersangka Tak Ada Kejelasan

Mangupura (Bali Post) -

Kejaksaan Tinggi (Kejati) Bali yang begitu getol menyidik kasus dugaan penyimpangan dalam kasus bantuan pengadaan tujuh unit kapal ikan di Buleleng dan lima kapal ikan di Benoa, hingga saat ini belum ada hasil yang dituntaskan. Sempat dikatakan ada dua calon tersangka, namun hingga saat ini belum juga ada kejelasan.

Kasipenkum Humas Kejati Bali Ashari Kurniawan yang dikonfirmasi via ponsel, Senin (12/12), mengaku belum menerima laporan dari penyidik terkait perkembangan kasus tersebut. "Belum kita ketahui perkembangan terakhir. Saya sendiri belum menerima laporan dari penyidik. Nanti kalau sudah ketemu penyidik dan ada hasilnya, saya sampaikan," tandas Ashari Kurniawan.

Untuk diketahui, pihak kejaksaan sebelumnya mengaku bahwa final kasus itu manakala penyidik akan melakukan ekspos setelah memeriksa ahli. Sedangkan tim ahli dari Biro Klasifikasi Indonesia (BKI) Jakarta sudah mengecek kondisi fisik tujuh unit kapal bantuan Pemprov Bali dan Kementerian Kelautan Perikanan (KKP) di Sumberkima, Buleleng. Pihak penyidik sudah hampir sebulan ke lokasi. Di singgung soal itu, Ashari mengatakan, pemeriksaan masih dilakukan untuk mendapatkan hasil akurat. Pemeriksaan tidak bisa dilakukan terburu-buru. Lantas, kapan hasil pemeriksaan keluar, Ashari menyatakan belum mengetahui pasti. "Yang jelas sampai saat ini kami belum mendapatkan informasi. Kami akan kabarkan kalau sudah ada kepastian," imbuhnya.

Sebelumnya, beberapa nelayan mengaku kondisi kapal tidak sesuai dengan yang diharapkan. Fisik kapal sangat tidak laik pakai. Bahkan, nelayan tidak berani menggunakan kapal melaut karena kapal kondisinya tidak kuat. Yang miris, kondisi real kapal dengan harga diduga jauh berbeda. Kondisi inilah yang dijadikan dasar kejaksaan membidik kasus yang pagu anggarannya lebih dari Rp 10 miliar tersebut. (kmb37)

Edisi : Rabu, 14 Des 2016

Hal : 15